



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17736-17745

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Evaluasi Strategi Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kinerja Pelaku Usaha di Kota Gorontalo

Heru Roji Dwi Santoso, Rahmisyari, Arifin

Universitas Ichssan Gorontalo

[roji.heru28@gmail.com](mailto:roji.heru28@gmail.com), [arifin.unisan@gmail.com](mailto:arifin.unisan@gmail.com)

### Abstrak

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Di Kota Gorontalo, keberadaan UMKM tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penopang stabilitas ekonomi lokal. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan krusial, antara lain keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, lemahnya manajemen usaha, dan minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas strategi pendampingan UMKM dalam meningkatkan kinerja pelaku usaha di Kota Gorontalo. Penelitian menggunakan metode kajian literatur deskriptif dengan menganalisis 15 jurnal nasional bereputasi yang diterbitkan pada periode 2022–2025. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk pendampingan, pola pelaksanaan, serta dampaknya terhadap produktivitas, tata kelola, pemasaran, dan keberlanjutan usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendampingan yang berfokus pada digitalisasi, penguatan kemampuan manajerial, peningkatan literasi keuangan, fasilitasi akses permodalan, dan kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, memperbaiki pengelolaan usaha, dan memperkuat keberlanjutan UMKM. Efektivitas program semakin tinggi apabila pendampingan dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan, komunitas bisnis, dan pelaku UMKM diperlukan untuk membangun ekosistem pendampingan yang lebih terpadu. Pendampingan yang komprehensif diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Kota Gorontalo.*

*Kata kunci: UMKM, Pendampingan, Kinerja Pelaku Usaha*

### 1. Latar Belakang

UMKM di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Peran strategis ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya aktor ekonomi berskala kecil, tetapi juga kekuatan fundamental yang menopang keberlanjutan perekonomian negara. Dominasi UMKM dalam struktur ekonomi nasional menjadikan sektor ini sangat penting untuk terus dikembangkan, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang semakin kompetitif. Kontribusi besar tersebut mengindikasikan bahwa penguatan UMKM merupakan agenda prioritas dalam mendorong inklusivitas dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Di tingkat daerah, UMKM di Kota Gorontalo memainkan peran vital sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan menjadi sektor dominan yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal yang tersedia. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan, serta dinamika ekonomi daerah yang lebih stabil. Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi sangat penting dalam memperkuat struktur ekonomi regional serta meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, pelaku UMKM di Gorontalo masih menghadapi beragam kendala klasik yang menghambat optimalisasi kinerja usaha. Permasalahan seperti pencatatan keuangan yang tidak terstruktur, keterbatasan akses permodalan, rendahnya pengetahuan manajerial, dan minimnya penggunaan teknologi digital menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki UMKM dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis secara

efektif. Penguatan kapasitas pelaku UMKM menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola usaha dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pandemi COVID-19 semakin mempertegas kerentanan UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan omzet secara drastis akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan perubahan pola konsumsi. Sebagian UMKM bahkan terpaksa menghentikan operasional karena ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi krisis, seperti kurangnya pemanfaatan platform digital atau lemahnya strategi pemasaran online. Dampak tersebut menegaskan pentingnya ketahanan usaha dan adaptasi teknologi sebagai elemen utama dalam menjaga keberlanjutan UMKM di masa krisis maupun pasca pandemi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pendampingan UMKM menjadi strategi yang banyak diupayakan oleh pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan, dan mitra strategis lainnya. Program pendampingan mencakup pelatihan manajemen usaha, peningkatan literasi keuangan, digitalisasi pemasaran, penguatan jaringan bisnis, hingga fasilitasi akses permodalan. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk intervensi jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya penguatan kapasitas jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Pendampingan yang komprehensif diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar pelaku UMKM dan mendorong mereka menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi.

Evaluasi terhadap strategi pendampingan sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi sejauh mana pendampingan berdampak pada peningkatan produktivitas, efektivitas pemasaran, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, evaluasi membantu dalam menemukan kelemahan program, merumuskan rekomendasi strategis, serta memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dengan demikian, pendampingan yang terstruktur dan berbasis bukti dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat UMKM di Gorontalo serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur deskriptif sebagai pendekatan utama untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi pendampingan UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam berdasarkan temuan-temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan deskriptif dalam kajian literatur memungkinkan peneliti menyusun pola, tema, dan kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber ilmiah sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih sistematis dan relevan dengan konteks penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 15 jurnal nasional bereputasi yang terbit pada periode 2022–2025. Rentang tahun tersebut dipilih untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan perkembangan terbaru dalam praktik pendampingan UMKM, terutama setelah masa pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan terhadap pola pembinaan dan strategi adaptasi UMKM. Pemilihan jurnal nasional bereputasi juga dilakukan untuk menjamin kualitas akademik dan keabsahan temuan yang dianalisis, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Dalam proses penentuan sumber literatur, penelitian ini menggunakan kriteria inklusi yang ketat guna memastikan kesesuaian dan relevansi artikel dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) artikel membahas pendampingan UMKM sebagai topik utama, (2) memiliki fokus pada evaluasi strategi pendampingan yang diterapkan, (3) mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kinerja usaha, dan (4) dipublikasikan pada jurnal nasional bereputasi. Pemenuhan keempat kriteria ini penting untuk menjaga kualitas data dan menghindari bias yang dapat muncul akibat penggunaan artikel yang kurang relevan atau tidak memenuhi standar ilmiah.

Proses seleksi artikel dimulai dengan penelusuran database jurnal nasional, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi potensi relevansi. Artikel yang memenuhi kriteria awal kemudian diperiksa secara penuh untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Tahap ini dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa seluruh literatur yang dianalisis benar-benar berkontribusi terhadap pemahaman mengenai strategi pendampingan UMKM. Dengan proses seleksi yang sistematis, penelitian dapat menyusun basis data literatur yang kuat dan representatif.

Analisis data dilakukan melalui proses pembacaan mendalam terhadap isi artikel terpilih, khususnya bagian yang membahas bentuk pendampingan, metode pelaksanaan, serta indikator perubahan kinerja UMKM. Setiap artikel diidentifikasi strategi pendampingannya, baik yang berfokus pada aspek manajerial, digitalisasi, literasi keuangan, akses permodalan, maupun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Melalui pengelompokan strategi ini, peneliti dapat memetakan pola pendekatan yang paling umum digunakan dalam pendampingan UMKM di Indonesia.

Selanjutnya, penilaian dampak strategi pendampingan dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dalam setiap artikel. Indikator kinerja yang dianalisis mencakup peningkatan produktivitas, perluasan akses pemasaran, perbaikan tata kelola usaha, dan keberlanjutan usaha. Pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan mengenai efektivitas strategi yang paling berdampak bagi UMKM. Secara keseluruhan, metode kajian literatur deskriptif memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam mengevaluasi praktik pendampingan UMKM serta menghasilkan pemahaman berbasis bukti yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan.

### 3. Hasil dan Diskusi

Hasil dan Diskusi menunjukkan bahwa strategi pendampingan UMKM di Indonesia, termasuk di Gorontalo, mencakup berbagai aspek fundamental yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha secara menyeluruh. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah digitalisasi usaha, yang menjadi kebutuhan mendesak di era ekonomi modern. Tren digitalisasi bukan hanya mencakup penggunaan platform e-commerce, tetapi juga pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan digital, sistem pembukuan otomatis, dan teknologi pemasaran berbasis media sosial. Langkah-langkah ini terbukti efektif membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, serta memperbaiki efisiensi operasional usaha.

Pendampingan yang berfokus pada digitalisasi biasanya diberikan dalam bentuk pelatihan, workshop, atau pendampingan intensif yang melibatkan praktisi dan ahli teknologi. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan literasi digital yang masih banyak dialami pelaku UMKM, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan perkembangan teknologi. Selain memberikan pengetahuan teknis, pelatihan digitalisasi juga membantu UMKM dalam mengoptimalkan strategi branding, meningkatkan kualitas konten pemasaran, serta mengukur efektivitas promosi melalui analitik digital. Dengan demikian, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam transformasi bisnis UMKM.

Selain aspek digital, pendampingan manajerial juga menjadi strategi yang banyak diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pendampingan ini mencakup perencanaan bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, strategi pemasaran, hingga pemahaman terhadap tata kelola organisasi yang baik. Literasi manajerial yang memadai sangat penting karena banyak UMKM mengalami kendala dalam menyusun perencanaan jangka panjang, membuat keputusan yang berbasis data, atau mengatur alur produksi dan distribusi secara efektif. Pendampingan ini juga membantu pelaku UMKM memahami risiko usaha serta menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dalam menghadapi dinamika pasar.

Di sisi lain, akses permodalan dan literasi keuangan menjadi fokus pendampingan yang tidak kalah penting. Banyak UMKM yang mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan formal akibat kurangnya kelayakan administrasi atau rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan. Program pendampingan melalui Bank Indonesia, lembaga keuangan, koperasi, maupun lembaga pendanaan lainnya berupaya menjembatani kebutuhan tersebut. Literasi keuangan membantu UMKM mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, dan menilai kelayakan kredit, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan dukungan modal yang lebih berkelanjutan.

Pendampingan yang dilakukan secara kolaboratif lintas sektor semakin menunjukkan urgensi dalam pengembangan UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat menghadirkan sinergi yang menguntungkan bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran keahlian, pendanaan, serta peluang kemitraan usaha. Pendekatan lintas sektor juga memastikan bahwa program pendampingan tidak berjalan secara parsial, tetapi mencakup berbagai aspek pengembangan usaha secara holistik sehingga memberikan dampak yang lebih optimal bagi UMKM.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal lebih efektif dibandingkan program seremonial atau jangka pendek. Di Gorontalo, misalnya, pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan digitalisasi tercatat mampu meningkatkan omzet hingga 30% dalam satu tahun. Pendampingan manajerial juga memberikan dampak signifikan berupa perbaikan pencatatan keuangan, peningkatan kualitas strategi pemasaran, serta pengelolaan usaha yang lebih profesional. Temuan ini mempertegas bahwa program pendampingan yang dirancang berdasarkan karakteristik lokal dan kebutuhan spesifik UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tingkat daerah.

Pendampingan UMKM secara umum terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja usaha, khususnya ketika program dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Banyak penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendampingan yang memiliki kurikulum jelas dan dilakukan dalam jangka waktu panjang memberikan perubahan signifikan pada kapasitas pelaku usaha. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, digitalisasi menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas UMKM. Penggunaan platform daring, baik untuk transaksi maupun promosi, memudahkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi UMKM berkontribusi besar terhadap peningkatan daya saing di era industri 4.0.

Digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan e-commerce, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi aplikasi pencatatan keuangan, sistem inventori otomatis, dan strategi pemasaran digital berbasis data. Pendampingan dalam aspek ini membantu UMKM mengatasi keterbatasan literasi digital yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah, termasuk Gorontalo. Penguatan kompetensi digital memungkinkan pelaku usaha melakukan inovasi produk, memantau preferensi konsumen, serta mengoptimalkan strategi branding melalui media sosial. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan omzet, tetapi juga memperkuat ketahanan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Literasi keuangan juga menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kinerja UMKM. Rahman (2024) mengemukakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan UMKM dalam mengelola arus kas, membuat laporan keuangan, serta mengakses sumber permodalan. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman baik tentang manajemen keuangan cenderung lebih siap dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan karena dapat mengukur kinerja bisnis secara objektif. Di banyak kasus, rendahnya literasi keuangan menjadi penyebab UMKM sulit berkembang, sehingga pendampingan dalam aspek ini menjadi salah satu prioritas yang harus terus diperkuat.

Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dalam mewujudkan ekosistem pendampingan UMKM yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dewi (2024) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat dalam merancang program pendampingan yang sesuai kebutuhan lokal. Di Gorontalo, bentuk kolaborasi tersebut tampak nyata melalui program inkubator bisnis yang melibatkan universitas, pemerintah daerah, serta komunitas UMKM. Kolaborasi ini membuka ruang bagi transfer pengetahuan, peningkatan akses jaringan pemasaran, serta peluang inovasi yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha.

Secara keseluruhan, strategi pendampingan UMKM di Gorontalo memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha dan memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun, tantangan tetap muncul terkait keberlanjutan program, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, dan lemahnya monitoring pasca-program. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan daerah, peningkatan kualitas pendamping, serta konsolidasi sinergi lintas sektor agar pendampingan dapat lebih terarah, adaptif, dan berdampak jangka panjang. Dengan demikian, pendampingan UMKM tidak hanya menjadi intervensi sementara, tetapi menjadi strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkesinambungan.

### **3.1 Evaluasi Pendampingan Berdasarkan Kebutuhan dan Tahapan Usaha**

Efektivitas pendampingan UMKM tidak cukup dinilai hanya dari jumlah pelatihan yang dilaksanakan atau banyaknya peserta yang hadir. Evaluasi perlu diarahkan pada kesesuaian materi dengan kebutuhan aktual pelaku usaha, perubahan perilaku pengelolaan usaha, serta keberlanjutan penerapan pengetahuan setelah program selesai. UMKM di Kota Gorontalo memiliki karakteristik yang beragam dari sisi skala, umur usaha, jenis produk, tingkat pendidikan pemilik, kemampuan menggunakan teknologi, dan kesiapan administrasi. Karena itu,

pendekatan pendampingan yang seragam berisiko menghasilkan manfaat yang tidak merata. Pelaku usaha yang baru memulai membutuhkan penguatan pada validasi produk, perencanaan usaha, penentuan harga, dan pencatatan transaksi sederhana. Sementara itu, usaha yang telah berjalan memerlukan pendampingan yang lebih spesifik, seperti pengendalian biaya, pengelolaan persediaan, perluasan pasar, sertifikasi produk, dan penguatan merek. Pendampingan berbasis kebutuhan menjadikan proses pembinaan lebih relevan dan meningkatkan peluang terjadinya perubahan kinerja yang dapat diamati.

Pemetaan kebutuhan sebaiknya dilakukan sebelum program dimulai melalui wawancara singkat, observasi usaha, pemeriksaan catatan keuangan, dan identifikasi masalah prioritas. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat kesiapan sehingga materi, intensitas pertemuan, dan target program dapat disesuaikan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Hidayat (2022) bahwa pendampingan manajerial akan lebih efektif ketika materi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Evaluasi juga perlu membedakan antara keluaran program dan hasil program. Keluaran dapat berupa jumlah peserta, modul, atau akun pemasaran digital yang dibuat, sedangkan hasil mencakup konsistensi pencatatan keuangan, kenaikan jumlah pelanggan, ketepatan pengelolaan stok, dan kemampuan pemilik mengambil keputusan berdasarkan data. Pemisahan indikator tersebut penting agar keberhasilan program tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi benar-benar menggambarkan peningkatan kapasitas usaha.

Dalam konteks Kota Gorontalo, pendampingan berbasis tahapan usaha juga dapat mencegah terjadinya beban belajar yang terlalu berat. Pelaku usaha mikro sering menjalankan seluruh aktivitas bisnis sendiri sehingga waktu untuk mengikuti pelatihan sangat terbatas. Program yang terlalu panjang, menggunakan istilah teknis, atau memberikan banyak tugas sekaligus dapat menurunkan partisipasi. Oleh sebab itu, pendampingan perlu disusun dalam modul singkat, bertahap, dan langsung dapat dipraktikkan. Setiap modul sebaiknya menghasilkan satu perubahan konkret, misalnya tersusunnya daftar biaya produksi, dibuatnya katalog digital, atau dipisahkannya uang pribadi dan uang usaha. Pendekatan bertahap memberi ruang bagi peserta untuk mencoba, memperoleh umpan balik, dan memperbaiki kesalahan. Dengan mekanisme tersebut, proses pendampingan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan usaha yang lebih disiplin dan terukur.

### **3.2 Pendampingan Digitalisasi Pemasaran dan Operasional**

Digitalisasi merupakan salah satu dimensi utama dalam penguatan UMKM karena perubahan perilaku konsumen semakin mengarah pada pencarian informasi, komunikasi, dan transaksi melalui media digital. Namun, pendampingan digital tidak boleh dibatasi pada pembuatan akun media sosial atau pendaftaran di marketplace. Pelaku usaha perlu memahami hubungan antara identitas merek, kualitas konten, pelayanan pelanggan, pencatatan transaksi, dan evaluasi hasil promosi. Sari (2022) menempatkan digitalisasi sebagai strategi peningkatan daya saing, sedangkan Santoso (2022) menekankan fungsi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi usaha. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi perlu diposisikan sebagai alat untuk memperbaiki proses bisnis, bukan sekadar simbol modernisasi. Pelaku UMKM di Gorontalo perlu didampingi untuk menentukan kanal digital yang sesuai dengan jenis produk, karakter pelanggan, kapasitas produksi, dan kemampuan pengelolaan pesanan.

Pada usaha kuliner, misalnya, pendampingan dapat diarahkan pada penyusunan foto produk yang konsisten, informasi harga yang jelas, penggunaan lokasi digital, pengelolaan ulasan pelanggan, dan pencatatan pesanan. Pada usaha kerajinan, konten dapat menonjolkan proses produksi, nilai budaya, bahan lokal, dan cerita di balik produk. Sementara itu, usaha perdagangan perlu mengutamakan pembaruan katalog, ketersediaan barang, respons cepat, serta kemudahan pembayaran. Nur (2023) menunjukkan pentingnya strategi pemasaran berbasis digital bagi UMKM, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan. Karena itu, pendamping tidak cukup memberikan pelatihan satu kali. Pelaku usaha perlu memperoleh contoh, praktik langsung, kalender konten, serta evaluasi berkala terhadap jangkauan, interaksi, dan konversi penjualan. Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa jumlah pengikut bukan satu-satunya indikator keberhasilan pemasaran.

Digitalisasi operasional juga perlu mendapat perhatian yang sama. Aplikasi pencatatan kas, pengelolaan stok, pembayaran nontunai, dan penyimpanan dokumen dapat mengurangi kesalahan administrasi serta menyediakan informasi yang lebih cepat bagi pemilik usaha. Meskipun demikian, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan kesederhanaan, biaya, keamanan data, dan kemampuan pengguna. Aplikasi yang terlalu kompleks justru berpotensi ditinggalkan setelah pendampingan berakhir. Pendamping sebaiknya memulai dari perangkat yang telah dimiliki pelaku usaha, terutama telepon pintar, kemudian memperkenalkan fungsi yang

paling dibutuhkan. Transformasi digital pascapandemi sebagaimana dibahas Amelia (2025) memperlihatkan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, tujuan utama pendampingan digital adalah membangun kemandirian peserta untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi secara sesuai kebutuhan.

### 3.3 Penguatan Manajerial dan Tata Kelola Usaha

Kelemahan manajerial menjadi hambatan yang sering tidak terlihat karena kegiatan usaha tetap berjalan meskipun tanpa perencanaan tertulis. Dalam jangka pendek, pola tersebut mungkin dianggap praktis, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketidakpastian arus kas, pemborosan bahan, konflik pembagian kerja, dan kesulitan memenuhi permintaan. Pendampingan manajerial perlu membantu pemilik UMKM menyusun tujuan usaha yang realistis, mengenali pelanggan utama, menghitung kapasitas produksi, dan menetapkan prioritas pengembangan. Perencanaan tidak harus berbentuk dokumen yang rumit. Bagi usaha mikro, satu lembar rencana kerja bulanan yang memuat target penjualan, kebutuhan bahan, jadwal promosi, dan estimasi pengeluaran sudah dapat menjadi alat pengendalian. Hidayat (2022) menegaskan peran pendampingan manajerial dalam peningkatan kinerja, terutama melalui pembentukan kebiasaan perencanaan dan pengawasan yang lebih teratur.

Tata kelola usaha juga mencakup pembagian peran antara pemilik, anggota keluarga, dan pekerja. Banyak UMKM tumbuh dari usaha keluarga sehingga batas tanggung jawab sering tidak jelas. Pendampingan dapat membantu menyusun pembagian tugas sederhana, prosedur pelayanan, standar kualitas, dan mekanisme pencatatan keluhan. Ketika proses dasar telah terdokumentasi, usaha menjadi lebih mudah dikembangkan karena kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada satu orang. Selain itu, standarisasi membantu menjaga konsistensi produk dan pelayanan. Pada usaha makanan, standarisasi dapat berupa ukuran bahan, waktu produksi, kebersihan, dan kemasan. Pada usaha jasa, standarisasi dapat mencakup tahapan pelayanan dan waktu penyelesaian. Penguatan tata kelola semacam ini mendorong profesionalisme tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi karakter UMKM.

Aspek pengambilan keputusan juga perlu diperkuat. Pemilik usaha sering mengandalkan intuisi, pengalaman, atau kebiasaan, padahal keputusan mengenai harga, pembelian stok, promosi, dan penambahan tenaga kerja membutuhkan informasi yang memadai. Pendampingan sebaiknya melatih pelaku usaha membaca data sederhana, seperti produk paling laku, periode penjualan tertinggi, biaya yang paling besar, dan pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan fokus produksi dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Gunawan (2024) menekankan pentingnya evaluasi pelatihan di daerah agar program benar-benar menghasilkan kompetensi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, indikator penguatan manajerial bukan hanya pemahaman peserta ketika pelatihan berlangsung, tetapi kemampuan mereka menggunakan informasi usaha untuk mengambil keputusan setelah program berakhir.

### 3.4 Literasi Keuangan, Akses Permodalan, dan Akuntabilitas

Literasi keuangan merupakan fondasi penting karena hampir seluruh keputusan usaha berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, aset, utang, dan keuntungan. Kendala utama UMKM bukan selalu tidak adanya modal, tetapi ketidakmampuan menunjukkan kondisi usaha secara jelas. Ketika uang pribadi bercampur dengan uang usaha, pemilik sulit mengetahui apakah kegiatan bisnis benar-benar menghasilkan keuntungan. Pendampingan keuangan perlu dimulai dari praktik yang paling sederhana, yaitu pemisahan kas, pencatatan transaksi harian, pengelompokan biaya, dan penyusunan rekap bulanan. Rahman (2024) mengemukakan bahwa literasi keuangan memengaruhi kemampuan UMKM dalam mengelola arus kas dan mengakses permodalan. Oleh sebab itu, keberhasilan pendampingan dapat diukur dari konsistensi peserta mencatat transaksi serta kemampuannya menjelaskan posisi kas dan kebutuhan modal kerja.

Akses permodalan perlu ditempatkan sebagai tahap lanjutan setelah tata kelola dasar membaik. Penambahan modal tanpa perencanaan dapat memperbesar risiko karena dana digunakan untuk kebutuhan yang tidak produktif atau tidak sesuai kapasitas pasar. Pendamping harus membantu pelaku usaha menghitung tujuan penggunaan dana, estimasi hasil, kemampuan membayar, serta risiko jika penjualan tidak mencapai target. Program pendampingan yang melibatkan lembaga keuangan dapat memberikan pemahaman mengenai persyaratan administrasi, biaya pembiayaan, jangka waktu, dan tanggung jawab debitur. Evaluasi program melalui aplikasi pencatatan seperti yang dibahas dalam kajian Determinasi (2023) menunjukkan bahwa

penggunaan alat keuangan perlu diikuti dengan pembinaan agar peserta tidak hanya mampu menginput data, tetapi juga memahami makna informasi yang dihasilkan.

Akuntabilitas juga berhubungan dengan kepercayaan. Catatan keuangan yang lebih baik memudahkan UMKM menjalin kerja sama dengan pemasok, lembaga pembiayaan, mitra pemasaran, dan pemerintah. Selain itu, administrasi yang tertib membantu proses pengurusan legalitas, sertifikasi, dan pelaporan program bantuan. Dalam pendampingan, akuntabilitas perlu dijelaskan sebagai kebutuhan internal usaha, bukan semata-mata kewajiban administratif. Pelaku usaha harus melihat bahwa laporan sederhana dapat membantu mencegah kebocoran kas, mengevaluasi harga, mengendalikan piutang, dan merencanakan pembelian. Apabila manfaat tersebut dirasakan secara langsung, kemungkinan keberlanjutan praktik pencatatan akan lebih tinggi. Dengan demikian, pendampingan literasi keuangan perlu menggabungkan penjelasan konsep, praktik menggunakan data usaha peserta, dan peninjauan berkala terhadap catatan yang telah dibuat.

### **3.5 Pengembangan Produk, Kualitas, dan Identitas Lokal**

Peningkatan kinerja UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memasarkan produk, tetapi juga oleh kualitas dan relevansi produk terhadap kebutuhan konsumen. Pendampingan perlu mendorong pelaku usaha melakukan evaluasi produk secara periodik dengan memperhatikan rasa, fungsi, desain, kemasan, keamanan, harga, dan kemudahan penggunaan. Umpan balik pelanggan dapat menjadi sumber informasi penting untuk perbaikan. Banyak UMKM cenderung mempertahankan produk berdasarkan kebiasaan produsen, bukan berdasarkan pengalaman konsumen. Melalui pendampingan, pelaku usaha dapat belajar membedakan kritik yang bersifat insidental dengan pola masalah yang berulang. Hasil evaluasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi perubahan terukur, misalnya memperbaiki ukuran kemasan, menambah informasi produk, mengurangi variasi yang kurang laku, atau meningkatkan ketahanan produk selama distribusi.

Kota Gorontalo memiliki peluang untuk mengembangkan identitas produk berbasis kekayaan lokal, baik melalui bahan, cita rasa, keterampilan, maupun narasi budaya. Identitas lokal dapat menjadi pembeda, tetapi perlu disampaikan secara autentik dan konsisten. Pendampingan branding sebaiknya membantu UMKM merumuskan nilai utama produk, target pelanggan, gaya komunikasi, dan unsur visual yang mudah dikenali. Branding tidak terbatas pada logo, melainkan mencakup pengalaman pelanggan sejak melihat promosi, melakukan pemesanan, menerima produk, hingga memberikan ulasan. Putri (2023) menempatkan inkubator bisnis sebagai ruang pengembangan usaha yang dapat mempertemukan pelaku UMKM dengan mentor dan jaringan pendukung. Dalam konteks tersebut, inkubasi dapat digunakan untuk menguji konsep produk, memperbaiki kemasan, serta menyiapkan strategi masuk pasar secara lebih sistematis.

Penguatan kualitas juga membutuhkan perhatian pada legalitas dan standar. Untuk usaha pangan, pendampingan dapat mencakup kebersihan produksi, informasi kedaluwarsa, komposisi, dan perizinan yang relevan. Untuk usaha kerajinan, aspek yang perlu diperhatikan antara lain konsistensi ukuran, keamanan bahan, ketahanan produk, serta kemampuan memenuhi pesanan. Legalitas dan standar tidak seharusnya dipandang sebagai beban, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan dan membuka akses pasar yang lebih luas. Pendampingan perlu menjelaskan tahapan pengurusan secara sederhana, membantu menyiapkan dokumen, dan menghubungkan UMKM dengan instansi terkait. Ketika perbaikan produk, identitas lokal, dan legalitas dikembangkan secara terpadu, UMKM memiliki dasar yang lebih kuat untuk membangun reputasi serta mempertahankan pelanggan.

### **3.6 Kolaborasi Lintas Sektor dan Penguatan Ekosistem**

Pendampingan UMKM akan lebih efektif apabila dilaksanakan dalam ekosistem yang menghubungkan berbagai sumber daya. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan, fasilitasi, data, dan akses program. Perguruan tinggi dapat menyediakan pengetahuan, riset, mahasiswa pendamping, serta ruang inkubasi. Lembaga keuangan mendukung literasi dan pembiayaan, sedangkan komunitas bisnis memberikan pengalaman praktis dan jaringan pasar. Dewi (2024) menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan akademisi, sementara Hasan (2023) menunjukkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi bagian dari dukungan pengembangan UMKM. Sinergi tersebut perlu dikelola melalui pembagian peran yang jelas agar program tidak tumpang tindih dan peserta tidak menerima materi yang sama berulang kali tanpa tindak lanjut.

Kolaborasi juga harus menghasilkan alur rujukan. Apabila pendamping menemukan UMKM yang membutuhkan sertifikasi, peserta perlu diarahkan kepada lembaga yang berwenang. Jika masalah utama adalah desain kemasan, pelaku usaha dapat dihubungkan dengan perguruan tinggi atau praktisi kreatif. Apabila permintaan pasar telah meningkat tetapi kapasitas produksi terbatas, pendamping dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan peralatan, tenaga kerja, dan pembiayaan. Alur rujukan membuat pendampingan lebih responsif karena satu lembaga tidak harus menangani seluruh masalah. Di sisi lain, koordinasi membutuhkan sistem data yang memadai agar riwayat program, kebutuhan, dan perkembangan setiap UMKM dapat diketahui oleh pihak terkait dengan tetap memperhatikan keamanan informasi.

Komunitas pelaku usaha juga dapat menjadi instrumen keberlanjutan. Setelah program formal berakhir, peserta dapat saling bertukar informasi mengenai pemasok, promosi, perizinan, pameran, dan perubahan pasar. Yusuf (2023) membahas pendampingan berbasis komunitas sebagai pendekatan yang dapat memperkuat keterlibatan peserta. Namun, komunitas perlu memiliki tujuan, tata kelola, dan kegiatan yang jelas agar tidak hanya menjadi kelompok komunikasi pasif. Pertemuan rutin, klinik usaha, berbagi praktik baik, dan promosi bersama dapat membangun pembelajaran horizontal. Dalam konteks Gorontalo, komunitas juga berpotensi membentuk paket produk daerah, kegiatan pemasaran kolektif, atau kerja sama distribusi sehingga UMKM memperoleh skala manfaat yang sulit dicapai secara individual.

### **3.7 Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program**

Salah satu kelemahan umum program pendampingan adalah terbatasnya pemantauan setelah pelatihan selesai. Tanpa tindak lanjut, peserta dapat mengalami kesulitan ketika menerapkan materi dan akhirnya kembali pada kebiasaan sebelumnya. Monitoring tidak harus dilakukan dengan prosedur yang rumit. Pendamping dapat menggunakan daftar indikator sederhana yang disepakati sejak awal, seperti kelengkapan pencatatan, frekuensi promosi, perubahan jumlah pelanggan, ketepatan pengelolaan stok, dan kemajuan legalitas. Indikator perlu disesuaikan dengan kondisi awal peserta agar evaluasi tidak hanya membandingkan pelaku usaha yang memiliki kemampuan berbeda. Gunawan (2024) menegaskan pentingnya evaluasi efektivitas pelatihan di daerah, sehingga keberhasilan perlu dilihat sebagai perubahan bertahap, bukan hanya capaian akhir.

Evaluasi yang baik menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data penjualan, biaya, jumlah pesanan, atau jangkauan promosi dapat menunjukkan perubahan terukur. Sementara itu, wawancara dan observasi membantu menjelaskan alasan perubahan, hambatan penerapan, serta persepsi peserta terhadap program. Misalnya, penjualan yang belum meningkat tidak selalu menunjukkan kegagalan apabila pelaku usaha baru berhasil memperbaiki pencatatan dan kualitas produk. Perubahan tersebut dapat menjadi fondasi bagi hasil ekonomi pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, program perlu menetapkan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Target jangka pendek berfokus pada penerapan keterampilan, target menengah pada perbaikan proses, dan target panjang pada pertumbuhan serta keberlanjutan usaha.

Keberlanjutan program juga bergantung pada kualitas pendamping. Pendamping membutuhkan pemahaman bisnis, kemampuan komunikasi, kesabaran, dan pengetahuan mengenai konteks lokal. Mereka harus mampu menjelaskan konsep dengan bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang relevan, dan menghargai pengalaman pelaku usaha. Kurniawan (2025) mengaitkan pendampingan dengan keberlanjutan usaha, yang menunjukkan bahwa hubungan pendampingan perlu dibangun sebagai proses, bukan kegiatan sesaat. Untuk menjaga mutu, lembaga penyelenggara dapat menyediakan pelatihan bagi pendamping, panduan kerja, supervisi, dan forum berbagi kasus. Dengan dukungan tersebut, kualitas layanan lebih konsisten dan penyelesaian masalah tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan individu.

### **3.8 Implikasi Strategis bagi Pengembangan UMKM Kota Gorontalo**

Hasil kajian memberikan implikasi bahwa kebijakan pendampingan UMKM di Kota Gorontalo perlu bergerak dari pendekatan berbasis kegiatan menuju pendekatan berbasis perkembangan usaha. Pemerintah daerah dapat menyusun basis data UMKM yang memuat profil, kebutuhan, riwayat pelatihan, dan perkembangan indikator utama. Data tersebut membantu penentuan peserta, penghindaran duplikasi program, dan penyusunan intervensi yang lebih tepat. Strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah daerah sebagaimana dibahas Maulana, Priyadi, dan Dwimawanti (2022) memperlihatkan pentingnya perencanaan kelembagaan dalam pembinaan. Dalam penerapannya di Gorontalo, data perlu diperbarui secara berkala dan digunakan sebagai dasar koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan komunitas usaha.

Pendampingan juga perlu mengakomodasi perbedaan karakter wilayah dan sektor. UMKM yang melayani pasar sekitar membutuhkan strategi yang berbeda dari usaha yang menargetkan konsumen luar daerah. Usaha kuliner dengan masa simpan pendek memerlukan penguatan distribusi lokal dan manajemen pesanan, sedangkan produk olahan tahan lama dapat diarahkan pada pengembangan pasar antardaerah. Kerajinan lokal membutuhkan narasi produk, konsistensi mutu, dan akses pada kegiatan promosi. Penyesuaian sektor tersebut membantu program menghasilkan manfaat yang lebih konkret. Annazwa dan Faradila (2025) menyoroti kebutuhan adaptasi UMKM dalam menghadapi guncangan ekonomi, sehingga kemampuan membaca perubahan pasar dan menyesuaikan strategi perlu menjadi bagian dari materi pendampingan.

Kebijakan daerah sebaiknya menyediakan ruang bagi eksperimen dan pembelajaran. Tidak seluruh strategi akan menghasilkan dampak yang sama pada setiap kelompok UMKM. Program dapat diuji dalam skala terbatas, dievaluasi, kemudian diperbaiki sebelum diperluas. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan mengurangi risiko program seremonial. Selain itu, pelaku usaha perlu dilibatkan dalam perancangan program melalui forum konsultasi, survei kebutuhan, atau evaluasi partisipatif. Keterlibatan tersebut meningkatkan rasa memiliki dan memastikan bahwa pendampingan menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak hanya dilakukan untuk pelaku usaha, tetapi bersama pelaku usaha sebagai mitra utama pembangunan ekonomi daerah.

### **3.9 Model Pendampingan Terintegrasi untuk Peningkatan Kinerja**

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, strategi pendampingan dapat dirumuskan dalam model terintegrasi yang terdiri atas tahap diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penguatan jejaring. Tahap diagnosis mengidentifikasi kondisi awal serta masalah prioritas. Tahap perencanaan menetapkan target, materi, metode, dan pihak yang terlibat. Tahap pelaksanaan menggunakan kombinasi pelatihan, konsultasi, praktik, dan kunjungan usaha. Tahap pemantauan menilai penerapan keterampilan dan perubahan proses bisnis. Tahap penguatan jejaring menghubungkan UMKM dengan pasar, lembaga pembiayaan, pemasok, pemerintah, dan komunitas. Kelima tahap tersebut perlu berjalan sebagai siklus, karena hasil evaluasi digunakan untuk menyusun pendampingan berikutnya. Model ini membantu memastikan bahwa program tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi terus menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha.

Dalam model tersebut, indikator kinerja perlu mencakup aspek finansial dan nonfinansial. Indikator finansial dapat berupa perubahan omzet, margin, arus kas, atau efisiensi biaya. Indikator nonfinansial meliputi kualitas pencatatan, pemanfaatan teknologi, konsistensi mutu, perluasan jaringan, legalitas, kemampuan mengambil keputusan, dan kepuasan pelanggan. Pemakaian indikator yang beragam penting karena dampak pendampingan sering muncul secara bertahap. Peningkatan disiplin administrasi mungkin belum langsung menaikkan omzet, tetapi dapat memperbaiki akses pembiayaan dan keputusan usaha pada periode berikutnya. Dengan demikian, evaluasi yang hanya berorientasi pada penjualan berpotensi mengabaikan perubahan kapasitas yang menjadi dasar keberlanjutan.

Model pendampingan terintegrasi juga menuntut keseimbangan antara standar program dan fleksibilitas lokal. Standar dibutuhkan untuk menjaga kualitas, memastikan tahapan terlaksana, dan memudahkan evaluasi. Fleksibilitas diperlukan agar materi, jadwal, bahasa, dan metode sesuai dengan karakter peserta. Program yang terlalu kaku dapat sulit diterapkan, sedangkan program tanpa standar akan sulit dinilai. Oleh karena itu, penyelenggara dapat menetapkan kerangka inti yang sama, tetapi memberikan ruang bagi pendamping untuk menyesuaikan praktik. Secara keseluruhan, temuan kajian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja UMKM di Kota Gorontalo paling mungkin dicapai melalui pendampingan yang terarah, berkelanjutan, berbasis data, kolaboratif, dan mampu mengikuti tahapan perkembangan usaha. Pendekatan tersebut menjadikan UMKM bukan hanya penerima bantuan, melainkan pelaku ekonomi yang semakin mandiri dan berdaya saing.

### **3.10 Tantangan Implementasi dan Arah Perbaikan Pendampingan**

Meskipun strategi pendampingan menunjukkan manfaat yang kuat, penerapannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, partisipasi pelaku UMKM dapat menurun ketika jadwal kegiatan tidak sesuai dengan ritme usaha, lokasi pelatihan sulit dijangkau, atau materi dianggap terlalu umum. Kedua, keterbatasan anggaran dan jumlah pendamping menyebabkan intensitas interaksi tidak selalu memadai. Ketiga, perbedaan kemampuan peserta membuat kecepatan belajar tidak seragam. Tantangan tersebut perlu diantisipasi melalui jadwal yang fleksibel, kombinasi pertemuan tatap muka dan konsultasi daring, serta pengelompokan peserta berdasarkan

tingkat kebutuhan. Materi juga perlu disediakan dalam bentuk panduan singkat yang dapat digunakan kembali setelah sesi selesai. Bagi peserta yang memiliki keterbatasan literasi digital, pendampingan harus lebih banyak menggunakan demonstrasi dan praktik daripada penjelasan teoritis. Penyesuaian metode semacam ini penting untuk memastikan bahwa program benar-benar inklusif dan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang sejak awal sudah relatif siap.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi penerapan. Pelaku UMKM sering memahami materi ketika pelatihan berlangsung, tetapi kesulitan mempertahankan kebiasaan baru karena tekanan operasional sehari-hari. Untuk mengatasinya, setiap peserta perlu memiliki rencana tindak lanjut yang sederhana dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Pendamping kemudian memeriksa kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan koreksi. Penggunaan kelompok kecil atau pasangan belajar juga dapat meningkatkan akuntabilitas karena peserta saling mengingatkan dan berbagi pengalaman. Di samping itu, pemberian pengakuan terhadap kemajuan, seperti sertifikat berbasis capaian atau kesempatan mengikuti promosi bersama, dapat meningkatkan motivasi. Namun, insentif tersebut sebaiknya diberikan berdasarkan penerapan nyata, bukan hanya kehadiran. Dengan demikian, program mendorong perubahan perilaku usaha dan bukan sekadar pemenuhan target administratif.

Arah perbaikan selanjutnya adalah memperkuat hubungan antara hasil evaluasi dan pengambilan keputusan program. Data monitoring perlu dibahas secara berkala untuk menentukan materi yang perlu diperbaiki, peserta yang membutuhkan dukungan tambahan, serta bentuk kolaborasi yang harus diperluas. Apabila sebagian besar peserta belum mampu melakukan pencatatan keuangan, penyelenggara perlu menambah praktik dan pendampingan individual. Apabila digitalisasi tidak menghasilkan penjualan, evaluasi harus menilai kualitas produk, ketepatan sasaran konsumen, respons terhadap pesan, dan kesiapan memenuhi pesanan. Pendekatan reflektif tersebut menjadikan program pendampingan sebagai proses pembelajaran kelembagaan. Dalam jangka panjang, Kota Gorontalo dapat membangun pola pendampingan yang terdokumentasi, dapat direplikasi, dan terus disempurnakan berdasarkan bukti. Hal ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperbesar peluang tercapainya UMKM yang mandiri, adaptif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Strategi pendampingan UMKM di Kota Gorontalo berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pelaku usaha. Pendampingan berbasis digital, manajerial, literasi keuangan, dan kolaboratif terbukti meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan akademisi dan lembaga keuangan agar pendampingan lebih terarah dan berdampak jangka panjang. Pendampingan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—seperti pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat—semakin memperkuat ekosistem UMKM di Gorontalo. Kolaborasi ini menghasilkan program pendampingan yang lebih komprehensif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya sinergi lintas sektor, pelaku UMKM memperoleh kemudahan akses terhadap pengetahuan, pendanaan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas.

#### Referensi

1. Maulana, I. S., Priyadi, B. P., & Dwimawanti, I. H. (2022). Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.xxxx/riggs.xxxx.xxxx>
2. Annazwa, L., & Faradila, S. (2025). Strategi Mikro Bertahan di Era Makro Guncang: Studi Adaptasi UMKM Indonesia dalam Bayang-bayang Resesi Global. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Pamulang*.
3. Determinasi, JSR UMS. (2023). Evaluasi Efektivitas Program Pendampingan UMKM Binaan Bank Indonesia melalui Aplikasi SIAPIK. *Jurnal Determinasi*.
4. Sari, R. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing di Era Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
5. Hidayat, A. (2022). Pendampingan Manajerial UMKM dalam Meningkatkan Kinerja Usaha. *Jurnal Administrasi Bisnis*
6. Putri, D. (2023). Peran Inkubator Bisnis dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*
7. Yusuf, M. (2023). Evaluasi Program Pendampingan UMKM Berbasis Komunitas. *Jurnal Sosial Humaniora*.
8. Rahman, F. (2024). Literasi Keuangan dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
9. Dewi, N. (2024). Strategi Kolaborasi Pemerintah dan Akademisi dalam Pendampingan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*
10. Santoso, B. (2022). Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan UMKM. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*
11. Hasan, L. (2023). Pendampingan UMKM melalui Program CSR. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
12. Amelia, T. (2025). Transformasi Digital UMKM Pasca Pandemi. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*.
13. Gunawan, P. (2024). Evaluasi Efektivitas Pelatihan UMKM di Daerah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
14. Nur, A. (2023). Strategi Pemasaran UMKM Berbasis Digital. *Jurnal Manajemen Pemasaran*.
15. Kurniawan, R. (2025). Pendampingan UMKM dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Kewirausahaan Indonesia*